

REVIU DAN ANALISIS BELANJA OPERASIONAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN

Review and Analysis of The Operational Expenditure Budget of State Ministry/Institutions for The Economy and Maritime Affairs

Shiddiq Ardhi Irawan¹

Info Artikel

¹ Direktorat Jenderal Anggaran,
Jakarta,
shiddiq.irawan@kemenkeu.go.id

Riwayat Artikel :

Diterima 14 - 10 - 2023
Direvisi 23 - 11 - 2023
Disetujui 27 - 11 - 2023
Tersedia online 01 - 12 - 2023

JEL Classification: H53, H61

Abstract

The State Revenue and Expenditure Budget is an important instrument in controlling the economy from shocks both internal and external to the Indonesian Government. In managing the APBN, it is hoped that it will be able to expand more productive economic activities so that it can improve community welfare. One of the components of the APBN is state spending, which has increased from year to year. However, this increase was not accompanied by an increase in the quality of planning and budgeting in allocating State Ministries/Institutions expenditure budgets. The State Ministries/Institutions of operational expenditure allocations have also increased in line with increasing state

spending. Based on the results of the review, in 2023 there will be a spending allocation that should not be included in State Ministries/Institutions operational goods spending amounting to IDR 576.4 trillion. This allocation can be reallocated to activities that benefit the community. Apart from that, this research also uses regression analysis, cluster analysis and confidence interval methods to calculate State Ministries/Institutions operational expenditure. From these results, there are four State Ministries/Institutions whose operational expenditure allocations are outside the limits determined based on the confidence interval value.

Keywords: *operational expenditure, the state revenue and expenditure budget, the state spending*

Abstrak

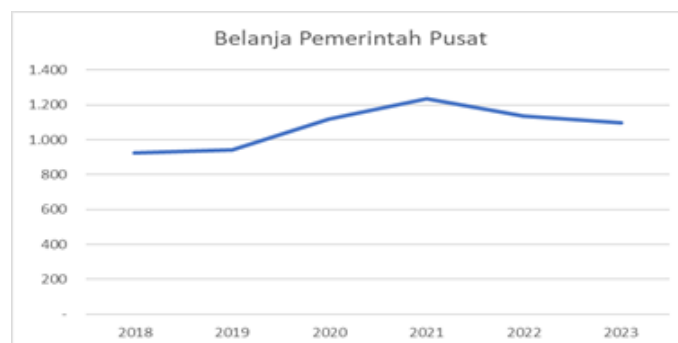
APBN merupakan instrumen penting dalam mengendalikan perekonomian dari guncangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Indonesia. Dalam pengelolaan APBN diharapkan mampu melakukan ekspansi kegiatan ekonomi yang lebih produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu komponen APBN adalah belanja negara yang secara tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran dalam mengalokasikan anggaran belanja K/L. Alokasi belanja operasional K/L juga mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya belanja negara. Berdasarkan hasil revidu, pada tahun 2023 terdapat alokasi belanja yang seharusnya tidak terdapat dalam belanja barang operasional K/L sebesar Rp576,4 Triliun. Alokasi tersebut dapat direalokasi untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis regresi, analisis cluster dan metode selang kepercayaan untuk menghitung belanja operasional K/L. Dari hasil tersebut, terdapat 4 K/L yang memiliki alokasi belanja operasional diluar batas yang ditentukan berdasarkan nilai selang kepercayaan.

Kata kunci: APBN, belanja barang operasional, belanja negara

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 23 ayat (1) UUD 1945, APBN merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN memiliki 6 (enam) fungsi yaitu fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Menurut Erman (2021), APBN merupakan instrument yang digunakan Pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi, kesempatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi dapat tercapai, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Secara umum, APBN dibagi menjadi 3 (tiga) komponen utama, yaitu anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan adalah segala bentuk penerimaan yang diperoleh oleh negara dalam satu tahun anggaran dan digunakan untuk menambah ekuitas dana lancar dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh negara. Belanja negara adalah segala bentuk pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban negara, dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh negara. Sedangkan pembiayaan adalah semua penerimaan negara dalam tahun tertentu yang harus dibayar kembali atau pengeluaran negara dalam tahun tertentu yang akan diterima kembali.

Belanja negara terdiri dari dua bagian yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Asumsi dasar makro ekonomi, kebutuhan penyelenggaraan negara, kebijakan pembangunan, risiko (bencana alam, dampak krisis global), gejolak ekonomi makro, kebijakan stimulus fiskal, dan kondisi serta kebijakan lainnya dapat berpengaruh terhadap belanja negara. Dengan adanya beberapa faktor tersebut mengakibatkan ruang fiskal belanja negara terbatas sehingga perlu dialokasikan dengan baik agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa peningkatan belanja negara berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selama 6 (enam) terakhir, total belanja pemerintah pusat secara umum mengalami kenaikan. Sejak tahun 2020, belanja pemerintah pusat lebih dari Rp1.000 triliun karena pada saat itu terjadi pandemi covid-19 sehingga pemerintah berupaya mengatasi hal tersebut dengan berbagai kebijakan. Secara umum, kenaikan belanja pemerintah pusat dapat dilihat pada gambar berikut.

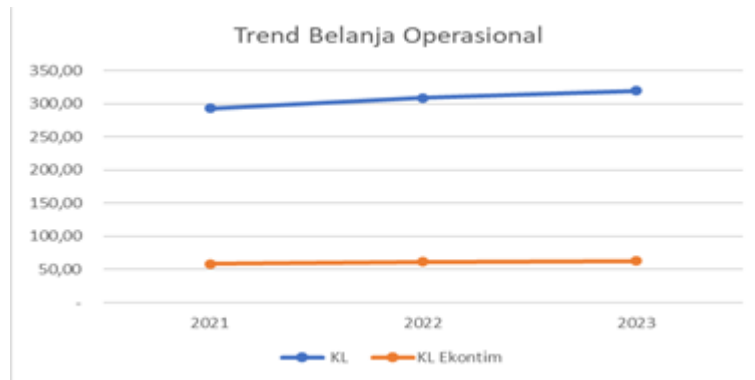


Sumber data : *Bussiness Intelligence DJA 2023*

Gambar 1. Trend kenaikan belanja pemerintah pusat

Kenaikan belanja pemerintah pusat tersebut juga ditopang tidak hanya belanja yang digunakan untuk masyarakat namun juga belanja operasional. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, alokasi belanja operasional seluruh K/L mengalami kenaikan tidak terkecuali K/L mitra

Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Hal tersebut salah satu penyebabnya karena adanya kebutuhan penanganan pandemi covid-19 untuk aparatur pemerintah. Secara umum kenaikan belanja operasional K/L mitra Direktorat Anggaran Perekonomian dan Kemaritiman digambarkan oleh grafik berikut.



Sumber data : Bussiness Intelligence DJA 2023

Gambar 2. Trend kenaikan belanja operasional

Namun demikian, jika dilihat dari sisi perencanaan terdapat deviasi yang relatif besar antara pengalokasian belanja operasional pada saat pagu dipa awal, pagu dipa revisi dan realisasi anggaran. Hal tersebut terjadi untuk semua K/L termasuk K/L Mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Berikut adalah grafik perbandingan deviasi belanja seluruh K/L dan K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.



Sumber data : Bussiness Intelligence DJA 2023, diolah.

Gambar 3. Deviasi Alokasi Belanja Operasional seluruh K/L vs K/L Mitra Ekontim

Berdasarkan data di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kenaikan belanja pemerintah pusat yang diikuti belanja operasional namun dalam proses perencanaannya masih belum tepat atau tidak efisien karena masih terdapat deviasi yang relatif besar antara belanja yang dialokasikan dengan realisasi anggaran. Anggaran dikatakan efisien jika realisasi anggaran sama atau mendekati pagu yang dialokasikan. Semakin kecil nilai deviasi maka alokasi tersebut semakin efisien. Deviasi antara pagu dipa revisi tahun 2021 dengan dipa awal sebesar 5% dan deviasi antara realisasi anggaran dengan pagu dipa revisi 0,1%. Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara khusus menilai belanja operasional yang telah dialokasikan sudah tepat dan sesuai dengan kaidah perencanaan dan penganggaran.

Salah satu komponen terpenting dalam belanja pemerintah pusat adalah belanja operasional K/L karena hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Renosa (2018) menjelaskan bahwa variabel realisasi belanja operasional K/L yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang operasional pada satu dan dua tahun sebelumnya memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Pagu Indikatif K/L. Hal ini berarti bahwa semakin besar alokasi belanja operasional maka semakin besar Pagu Indikatif K/L. Penelitian lain yang dilakukan oleh Norista Gathama Putra (2011) menunjukkan bahwa belanja operasional selama periode 2005 sampai 2008 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa alokasi anggaran untuk belanja operasional yang dilakukan pemerintah juga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah pertama yaitu *“Apakah belanja operasional K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman sudah dialokasikan sesuai kaidah perencanaan dan penganggaran”*. Setelah mengetahui hasil tersebut, maka rumusan masalah yang kedua yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu *“Bagaimana hasil analisis belanja operasional K/L Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman”*. Namun demikian, dalam penelitian ini dibatasi terhadap K/L mitra Direktorat Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ruang Lingkup K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Organisasi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Berdasarkan PMK tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari 9 (sembilan) Unit Eselon II yang salah satunya adalah Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

Tugas dari Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat bidang perekonomian dan kemaritiman, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman menyelenggarakan fungsi menyiapkan dan merumuskan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, melaksanakan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, melaksanakan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan melaksanakan urusan tata usaha Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

Dari total 84 K/L saat ini, terdapat 26 K/L yang diampu oleh Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian. K/L tersebut meruapakan K/L dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman terdiri dari satu Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis serta 5 (lima) Subdirektorat Teknis yang mengampu 26 K/L tersebut. Rincian K/L yang diampu oleh Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

No	K/L	No	K/L
1	Kementerian Keuangan	14	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
2	Kementerian Pertanian	15	Kementerian Investasi
3	Kementerian Perindustrian	16	Badan Standardisasi Nasional
4	Kementerian, Energi, Sumber Daya Mineral	17	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5	Kementerian Perhubungan	18	Kementerian Perdagangan
6	Kementerian Ketenagakerjaan	19	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	21	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	22	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
10	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	23	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
11	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	24	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
12	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	25	Badan Pangan Nasional
13	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	26	Otorita Ibu Kota Nusantara

Sumber data : Bussiness Intelligence DJA 2023, diolah.

2.2. Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Pusat

Belanja pengeluaran Pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah. Kedua jenis belanja pengeluaran tersebut merupakan bentuk rencana kerja Pemerintah dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional. Belanja Pemerintah Pusat dibagi menjadi belanja Kementerian/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan anggaran Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan bantuan sosial. Sementara itu, jenis belanja yang digunakan dalam proses penyusunan anggaran Bagian Anggaran BUN tidak terdapat belanja modal namun terdapat tambahan jenis belanja lain yaitu belanja pembayaran kewajiban utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Definisi dan jenis belanja Pemerintah Pusat tersebut diatur dalam

PMK Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Belanja Pemerintah Pusat dibagi menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja. Rincian belanja Pemerintah Pusat berdasarkan jenis belanja merupakan pengelompokan belanja Pemerintah Pusat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi dengan mengacu pada manual *Government Finance Statistics 2001 (GFS 2001 Manual)*. Sejak tahun 2005 dan sejalan dengan penerapan penganggaran terpadu, anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Jenis belanja tersebut digunakan dalam klasifikasi belanja dalam dokumen anggaran baik dalam proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban/pelaporan anggaran. Tujuan penggunaan jenis belanja dalam proses penyusunan anggaran dimaksudkan untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran ke dalam jenis-jenis belanja. Dalam rangka memberikan fleksibilitas dalam proses penyusunan anggaran, Kementerian/Lembaga menggunakan akun dengan kode 2 (dua) digit yang berarti jenis belanja. Namun demikian, penggunaan akun yang lebih detail dilakukan pada saat pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban/pelaporan anggaran. Oleh karena itu, penggunaan akun-akun yang sesuai dengan kaidah penganggaran yang berlaku harus dipedomani oleh K/L dalam proses penyusunan anggaran.

2.3. Alokasi Belanja Operasional K/L

Berdasarkan PMK Nomor 62 tahun 2023, belanja operasional adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah Satker dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berupa belanja pegawai operasional dan belanja barang operasional. Dalam penyusunan RKA-K/L terdapat hal-hal yang harus dialokasikan, meliputi:

- a. Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional satker yang sifatnya mendasar, terdiri dari belanja pegawai (komponen 001) serta untuk belanja barang operasional kantor (komponen 002).
- b. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak, pembayaran tunggakan, penyelesaian pekerjaan tahun sebelumnya dan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga termasuk pelaksanaan hasil keputusan pengadilan yang bersifat tetap (*inkracht*) dimana pada amar putusan terdapat perintah untuk membayar sejumlah uang, serta
- c. Program dan/atau kegiatan lintas yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang dan/atau prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RKP (Suhaimi, 2022).

Belanja Pegawai (komponen 001) adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah (PMK Nomor 62 tahun 2023). Belanja pegawai dipergunakan untuk:

- a. Belanja gaji dan tunjangan PNS dan TNI/Polri termasuk uang makan dan tunjangan lauk pauk yang melekat pada pembayaran gaji

- b. Belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji Pejabat Negara
- c. Belanja gaji dan tunjangan dokter/bidan pegawai tidak tetap
- d. Belanja honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan
- e. Belanja gaji dan tunjangan pegawai non-PNS, termasuk tunjangan tenaga pendidik dan tenaga penyuluh non-PNS
- f. Belanja lembur dalam rangka pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur
- g. Pembayaran tunjangan khusus, yaitu:
 - i. Pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Presiden atau Menteri Keuangan.
 - ii. Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/ dicairkan, namun database pegawai pada Kementerian/Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja Pegawai Satker karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan, termasuk dalam rangka pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian/Lembaga yang dilikuidasi;
 - iii. Pembayaran uang kompensasi atas pemberhentian sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi.
- h. Belanja pensiun dan uang tunggu PNS/ Pejabat Negara/TNI/Polri, termasuk belanja tunjangan hari tua; dan
- i. Pembayaran Program jaminan sosial pegawai meliputi belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan/atau jaminan kematian.

Belanja Barang Operasional (komponen 002) merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain (PMK Nomor 62 tahun 2023):

- a. Belanja keperluan perkantoran
- b. Belanja pengadaan bahan makanan
- c. Belanja penambah daya tahan tubuh
- d. Belanja bahan
- e. Belanja pengiriman surat dinas
- f. Honor yang terkait dengan operasional Satker
- g. Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai Listrik, Telepon, dan Air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni
- h. Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional)

- i. Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional Satker sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi
- j. Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satuan kerja
- k. Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2.4. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Secara umum pengelolaan keuangan negara Indonesia dibagi menjadi 4 (tiga) tahap, yaitu tahap I periode 1945 – 2003, tahap II periode 2004 – 2010, tahap III periode 2011-2020, dan tahap IV periode 2021 – sekarang. Tahap I menggunakan ketentuan peralihan UUD 1945 yaitu *Indische Comptabiliteitswet* dimana satuan anggaran dibagi menjadi anggaran rutin dan pembangunan. Tahap II disebut dengan reformasi penganggaran I dimana terdapat 3 (tiga) pilar penganggaran yaitu *Unified Budget*, *Performance Base Budgeting (PBB)*, dan *Medium Term Expenditure Framework (MTEF)* Tahap III disebut dengan reformasi penganggaran II dimana terdapat beberapa penyempurnaan kaidah penganggaran diantaranya penguatan PBB, reformulasi MTEF, format baru RKAKL, monev penganggaran, serta sinergi perencanaan dan penganggaran. Tahap IV merupakan hasil evaluasi dari sistem penganggaran sebelumnya dimana masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal, rumusan nomenklatur program dan outcome dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif), program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan, serta Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Kemenkeu dan Bappenas menyusun kaidah Redesain Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Pemerintah telah menyusun pedoman RSPP yang dituangkan dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-122/MK.2/2020 dan Nomor B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020. Di dalam SEB tersebut diatur dasar hukum, tujuan, manfaat, acuan, implikasi serta ruang lingkup RSPP. Tujuan RSPP yaitu untuk:

- a. Mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program*.
- b. Memperkuat penganggaran berbasis kinerja.
- c. Meningkatkan konvergensi Program dan Kegiatan antar K/L dalam konteks Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) sehingga mengurangi tumpang tindih Program dan Kegiatan antar K/L.
- d. Meningkatkan keselarasan rumusan Program dan Kegiatan antara dokumen perencanaan dan penganggaran.
- e. Menyusun informasi kinerja perencanaan dan penganggaran yang mudah dipahami masyarakat.
- f. Mendorong K/L untuk menerapkan *value for money*.
- g. Meningkatkan integrasi belanja Pemerintah Pusat dan Daerah.
- h. Mewujudkan keterkaitan dan keselarasan antara visi misi Presiden, arahan Presiden serta 7 agenda pembangunan dengan tugas fungsi K/L.

- i. Mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran yang mencerminkan *real work*.

Dengan adanya RSPP maka hal tersebut berdampak definisi informasi kinerja yang telah diterapkan sebelumnya diantaranya program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon I, tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi Kementerian/Lembaga, serta dirumuskan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN dengan berkoordinasi kepada K/L terkait, Outcome mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai secara nasional, Kegiatan tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon II atau Satker vertikal dari K/L, namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya outcome dan dapat bersifat lintas unit eselon II, lintas unit eselon I atau bahkan bersifat lintas K/L, serta output dibedakan menjadi: Output Program, Klasifikasi Rincian Output/KRO dan Rincian Output/RO serta harus mencerminkan "*real work*" atau "*eye catching*". KRO adalah kelompok/kumpulan produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik berupa barang (barang infrastruktur/barang non-infrastruktur) atau jasa (jasa regulasi/non regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan. KRO merupakan clustering atas Rincian Output (RO) sejenis dan memiliki satuan yang sama. RO adalah produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik berupa (barang infrastruktur/barang non-infrastruktur) atau jasa (jasa regulasi/non regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan. RO adalah barang/jasa riil (produk akhir) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan suatu unit/satker.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Data dan Sumber Data

Kajian ini seluruhnya menggunakan data sekunder yang berasal dari *business intelligence* Ditjen Anggaran. Objek yang dipilih dalam kajian ini ada K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman sebanyak 26 K/L dari total seluruh K/L sebanyak 84 K/L. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan K/L mitra masing-masing Direktorat lingkup Ditjen Anggaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga penelitian ini hanya difokuskan kepada K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Periode waktu data yang digunakan adalah tahun 2021-2023 karena sejak tahun 2021 telah menggunakan kaidah Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Variabel yang digunakan diantaranya pagu dipa awal, pagu dipa revisi, realisasi anggaran baik alokasi belanja operasional maupun total belanja K/L serta jumlah satker.

3.2. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensia. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat kondisi data secara umum baik dari segi persentase kenaikan belanja operasional maupun proporsi belanja operasional terhadap total belanja K/L. Selain itu, analisis deskriptif digunakan untuk melihat jenis akun yang digunakan dalam belanja operasional yang dikaitkan dengan ketentuan dalam kaidah RSPP. Sedangkan analisis inferensia berupa analisis regresi yang digunakan untuk menentukan variabel yang berpengaruh terhadap alokasi belanja operasional K/L. Hasil analisis regresi tersebut digunakan untuk membuat kelompok berdasarkan variabel yang signifikan. Selanjutnya masing-masing kelompok akan dihitung alokasi belanja operasional menggunakan metode selang kepercayaan. Alokasi belanja operasional K/L di tahun 2023 yang nilainya melebihi dari

hasil selang kepercayaan pada masing-masing kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa alokasi operasional K/L tersebut tidak efisien.

1. Reviu Belanja Operasional K/L

Reviu belanja operasional K/L dilakukan secara deskriptif untuk melihat perbandingan alokasi belanja operasional K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dibandingkan K/L mitra Direktorat lain. Analisis deskriptif tersebut juga digunakan untuk melihat komposisi belanja operasional K/L yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang operasional. Selain itu, reviu juga dilakukan terhadap penggunaan akun belanja operasional sesuai dengan kaidah RSPP.

2. Analisis Belanja Operasional K/L Berdasarkan Hasil Regresi

Dalam melakukan analisis belanja operasional K/L dilakukan dalam tiga tahapan. Tahapan pertama menentukan variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen menggunakan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut akan dilakukan analisis cluster untuk mengelompokkan K/L lingkup Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman yang memiliki kesamaan dalam satu cluster. Tahap ketiga yaitu membandingkan alokasi belanja operasional K/L tahun 2023 dengan hasil perhitungan selang kepercayaan.

Model regresi yang digunakan pada penelitian ini merupakan modifikasi model yang digunakan penelitian sebelumnya oleh Renosa (2018). Variabel yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda terdiri dari 3 (tiga) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen. Variabel dependen adalah total belanja operasional K/L (BO), sedangkan variabel independen adalah realisasi anggaran belanja pegawai t-2 (RBP2), realisasi anggaran belanja pegawai t-1 (RBP1), realisasi anggaran belanja barang operasional t-2 (RBB2), realisasi anggaran belanja barang operasional t-1 (RBB1), serta jumlah satker (S). Model proyeksi belanja operasional dalam kajian ini sebagai berikut:

$$BO = \beta_0 + \beta_1 RBP2 + \beta_2 RBP1 + \beta_3 RBB2 + \beta_4 RBB1 + \beta_5 S + \varepsilon$$

Dalam analisis regresi, terdapat pengujian statistik terhadap model yang diuji dengan menggunakan faktor-faktor berikut:

- a. Determinasi (uji R²), digunakan untuk mengukur kebaikan suatu model (goodnes of fit);
- b. Signifikansi Simultan (Uji F), untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen, yaitu realisasi anggaran belanja pegawai t-2 (RBP2), realisasi anggaran belanja pegawai t-1 (RBP1), realisasi anggaran belanja barang operasional t-2 (RBB2), realisasi anggaran belanja barang operasional t-1 (RBB1), serta jumlah satker (S) terhadap variabel dependen belanja operasional K/L;
- c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t), digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh satu variabel independen realisasi anggaran belanja pegawai t-2 (RBP2), realisasi anggaran belanja pegawai t-1 (RBP1), realisasi anggaran belanja barang operasional t-2 (RBB2), realisasi anggaran belanja barang operasional t-1 (RBB1), serta jumlah satker (S) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen belanja operasional K/L.

Uji asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linear yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas serta multikolinearitas. Uji asumsi klasik tersebut merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini bertujuan agar dapat menghasilkan model

regresi yang memenuhi kriteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Model regresi yang memenuhi kriteria BLUE dapat dikatakan bahwa model tersebut adalah model terbaik karena memiliki estimator tidak bias, konsisten, berdistribusi normal dan juga efisien.

Uji normalitas dilakukan untuk dapat menguji apakah data yang akan digunakan untuk uji hipotesis yaitu data dari variabel dependen dan independen yang digunakan telah berdistribusi secara normal atau tidak. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak, dalam penelitian ini menggunakan uji dengan analisis statistik yaitu uji Kolmogrov-Smirnov. Uji autokorelasi dilakukan untuk dapat menguji model regresi yang akan digunakan, apakah terdapat korelasi antara error pada pengamatan satu dengan error pada pengamatan sebelumnya atau tidak. Apabila terjadi korelasi antarpengamatan dalam runtut waktu, maka dapat dikatakan ada problema autokorelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji Runs (*Runs Test*).

Uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk dapat menguji apakah model regresi memiliki keragaman error yang sama atau tidak. Asumsi keragaman error yang sama ini disebut dengan homoskedastisitas, sedangkan heteroskedastisitas yaitu terjadi jika keragaman nilai errornya tidak konstan atau berbeda. Heteroskedastisitas dapat dideteksi melalui beberapa pengujian salah satunya yaitu Uji Gletser dimana melakukan uji regresi variabel bebas pada nilai residual yang telah diabsolutkan. Nilai residual ini dihasilkan melalui analisis regresi linier berganda pada data penelitian. Uji multikolinieritas ini ditujukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebasnya berhubungan secara linier atau saling berkorelasi. Multikolinieritas dapat diketahui melalui beberapa pengujian salah satunya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung nilai VIF dan Tolerance dari masing-masing variabel bebas (Setiawan, 2020).

Analisis cluster adalah salah satu teknik analisis statistik multivariate yang bertujuan untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Secara umum analisis cluster dibagi menjadi dua, yaitu metode hirarki dan non hirarki. Terdapat dua cara pengelompokan dalam metode hirarki, yaitu agglomerative (pemusatan) dan divisive (penyebaran). Dalam metode agglomerative (pemusatan) dikenal beberapa metode untuk membentuk sebuah cluster, diantaranya adalah metode pautan tunggal (Single Linkage), pautan lengkap (Complete Linkage), pautan rata-rata (Average Linkage), metode Ward (Ward's method), dan metode pusat (Centroid Method). Masing-masing pada metode ini memiliki perbedaan dalam cara pengelompokannya. Dalam melakukan analisis cluster terdapat asumsi yang harus dipenuhi yaitu tidak terdapat korelasi antar variabel (Hanada, 2021). Selang Kepercayaan adalah sebuah interval antara dua nilai yang memuat nilai parameter. Metode ini digunakan untuk mengukur range alokasi belanja operasional K/L dalam satu cluster. Selang yang terbaik dalam mengestimasi parameter adalah selang yang terpendek dan mempunyai tingkat kepercayaan paling tinggi. Berikut adalah persamaan selang kepercayaan yang digunakan:

$$\bar{X} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Keterangan:

\bar{X} = rata-rata data

σ = simpangan baku data

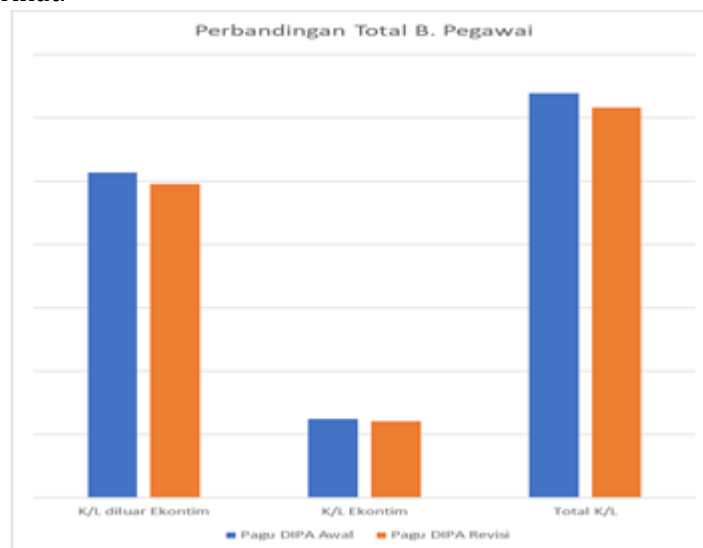
$Z_{\alpha/2}$ = Nilai Z tabel dengan taraf nyata 5%

n = jumlah data

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Reviu Alokasi Belanja Operasional K/L

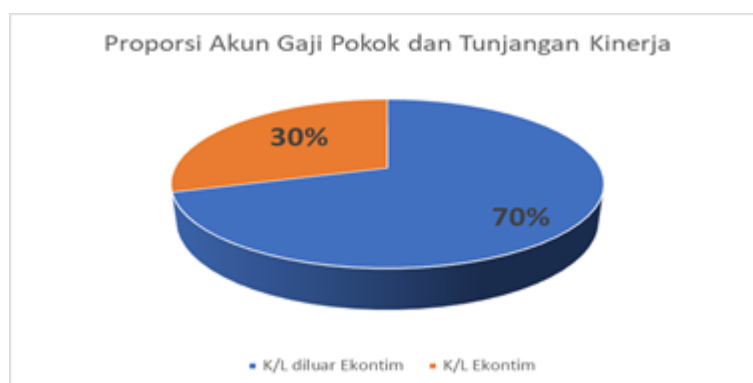
Komponen belanja operasional telah diatur dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023 yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang operasional. Berdasarkan kaidah RSPP, komponen merupakan unsur, bagian, cakupan, atau tahapan dari proses pencapaian output yang dapat memiliki keterkaitan antara satu komponen dan komponen lainnya dalam mendukung pencapaian rincian output. Belanja pegawai maupun belanja barang operasional masuk ke dalam komponen pada rincian output layanan perkantoran. Dalam mengalokasikan belanja pegawai, K/L mengacu pada kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 jo. KEP-291/PB/2022. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut diatur mengenai akun apa saja yang berkaitan dengan belanja pegawai. Dari hasil identifikasi pada pagu DIPA harian TA 2023, total belanja pegawai seluruh K/L sebesar Rp308,4 Triliun dimana untuk K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman sebesar Rp208,6 Triliun. Berdasarkan data pagu DIPA awal dibandingkan pagu DIPA revisi terdapat pengurangan sebesar Rp10,9 Triliun yang diakibatkan salah satunya karena adanya realokasi blokir Automatic Adjustment dari belanja pegawai ke BA BUN. Rincian perbandingan alokasi belanja pegawai sebagai berikut.



Sumber data : Bussiness Intelligence DJA 2023, diolah.

Gambar 4 Perbandingan Belanja Pegawai seluruh K/L vs K/L Mitra Ekontim

Dari total belanja pegawai seluruh K/L, alokasi akun belanja pegawai terbesar adalah akun belanja gaji pokok dan tunjangan kinerja sebesar Rp125,9 Triliun atau 40,8% dari total pagu belanja pegawai. Jika dibandingkan dengan pagu DIPA awal, maka pagu dipa revisi akun belanja gaji pokok dan tunjangan juga mengalami penurunan sebesar Rp10,6 Triliun. Jika dibandingkan antara K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan seluruh K/L maka nilainya sebesar 30% berbanding 70% sebagaimana grafik berikut.

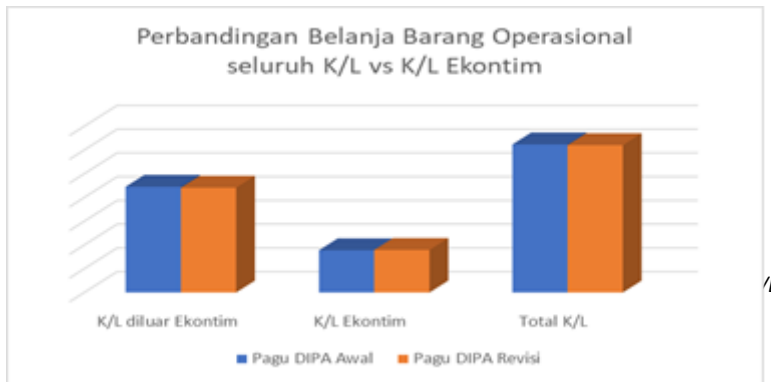


Sumber data: *Bussiness Intelligence DJA 2023, diolah.*

Gambar 5. Proporsi Akun Gaji Pokok dan Tunjangan Kinerja seluruh K/L vs K/L Mitra Ekontim

Berdasarkan hasil identifikasi penggunaan akun dalam belanja pegawai terdapat penggunaan akun yang tidak sesuai dengan kaidah perencanaan dan penganggaran yaitu akun belanja pegawai transito (512412). Dalam alokasi belanja pegawai seluruh K/L pada pagu DIPA awal terdapat alokasi belanja pegawai transito sebesar Rp186,8 Miliar. Anggaran tersebut dialokasikan pada 5 K/L diantaranya Kemnukumham, Kementan, Kemenhub, Kemenkes dan Kemenparekraf. Dari total belanja tersebut, alokasi terbesar terdapat pada Kemenkes sebesar Rp180 Miliar. Namun demikian, saat ini seluruh alokasi tersebut telah direvisi menjadi sebesar Rp4,7 Miliar.

Hasil identifikasi belanja barang operasional menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara alokasi pada pagu DIPA awal dengan pagu DIPA revisi sebesar Rp277 Miliar. Perbedaan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan perbedaan pada belanja pegawai. Namun demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran belanja barang operasional pada saat pengesahan DIPA awal belum dilakukan secara efisien. Jika dilihat dari perbandingan antara K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan diluar mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, didapat informasi yang berbeda dengan hasil identifikasi belanja pegawai. Pada belanja pegawai, seluruhnya alokasi pada pagu DIPA revisi lebih kecil dibandingkan dengan pagu DIPA awal. Sedangkan pada belanja barang operasional K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, alokasi pada pagu DIPA revisi lebih tinggi sebesar Rp139,7 Miliar dibandingkan pagu DIPA awal. Sebaliknya K/L diluar mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, alokasi pagu DIPA revisi lebih kecil sebesar Rp416,7 Miliar dibandingkan pagu DIPA awal. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman melakukan revisi penambahan pagu belanja barang operasional. Berikut grafik perbandingan pagu DIPA awal dan pagu DIPA revisi belanja barang operasional K/L.



Sumber data: Bussiness Intelligence DJA 2023, diolah.

Gambar 6. Perbandingan Belanja Barang Operasional seluruh K/L vs K/L Mitra Ekontim

Berdasarkan hasil identifikasi belanja barang operasional seluruh K/L sebesar Rp62,1 Triliun dapat dilihat komposisi dari beberapa akun belanja barang. Dari total tersebut, akun belanja barang yang memiliki komposisi alokasi relatif besar diantaranya belanja pemeliharaan dan belanja keperluan perkantoran masing-masing sebesar 21%. Dari komposisi tersebut juga dilihat komposisi akun belanja perjalanan dinas dan honor pengelola satker yang memiliki persentase masing-masing sebesar 3% dan 5%. Sedangkan sisanya sebesar 50% terdiri dari akun belanja jasa, belanja barang persediaan, belanja peralatan mesin dan peralatan serta belanja gedung dan bangunan. Berikut komposisi akun belanja barang operasional seluruh K/L.



Sumber data : Bussiness Intelligence DJA 2023, diolah.

Grafik 7. Komposisi Belanja Barang Operasional seluruh K/L

Dalam alokasi belanja barang operasional seluruh K/L terdapat beberapa akun belanja yang seharusnya tidak dialokasikan dalam belanja barang operasional. Hal tersebut juga termasuk bagian temuan dari Auditor karena tidak sesuai dengan kaidah RSPP. Akun tersebut diantaranya akun belanja honor output kegiatan, akun Belanja Bantuan Pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda, akun Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting, akun Belanja terkait Covid-19. Total anggaran sebesar Rp576,4 Miliar yang seharusnya tidak ada dalam komponen belanja barang operasional terdapat pada 169 K/L. Jumlah K/L tersebut melebihi total 86 K/L karena 1 (satu) K/L bisa terdapat lebih dari 1 (satu) jenis akun yang seharusnya tidak terdapat dalam belanja barang operasional. Rincian alokasi tersebut sebagai berikut.

Tabel 2. Rincian Alokasi Akun Yang Seharusnya Tidak Terdapat Dalam Belanja Barang Operasional

Akun	K/L Ekontim		K/L diluar Ekontim		Total	
	Jumlah K/L	Alokasi (Ribuan Rp)	Jumlah K/L	Alokasi (Ribuan Rp)	Jumlah K/L	Alokasi (Ribuan Rp)
Belanja Honor Output Kegiatan	19	57.352.703	35	196.772.613	54	254.125.316
Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	-	-	2	93.101	2	93.101
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	18	81.382.847	30	72.382.633	48	153.765.480
Belanja terkait Covid-19	20	116.048.967	45	52.357.174	65	168.406.141
Total	57	254.784.517	112	321.605.521	169	576.390.038

Sumber data: *Bussiness Intelligence DJA 2023, diolah.*

Akun belanja pada tabel di atas seharusnya tidak terdapat pada belanja barang operasional karena tidak sesuai dengan kaidah RSPP. Dari lima jenis akun tersebut, alokasi terbesar yang tidak sesuai adalah akun belanja honor output kegiatan sebesar Rp254,1 Miliar. Akun belanja honor output kegiatan merupakan Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output. Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidental dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut seharusnya akun belanja honor output kegiatan tidak termasuk ke dalam belanja barang operasional. Secara total alokasi belanja honor output kegiatan sebesar Rp254,1 Triliun. Komposisi terbesar terdapat pada K/L diluar mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian yaitu sebesar Rp196,8 Triliun pada 35 K/L.

Akun belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526xxx) seharusnya tidak masuk ke dalam belanja operasional karena merupakan kegiatan teknis untuk masyarakat/Pemda. Akun tersebut digunakan untuk pengadaan barang baik berupa tanah, peralatan, gedung, jalan, irigasi, dan jaringan serta barang fisik lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya. Berdasarkan definisi tersebut, seharusnya akun 526xxx tidak dialokasikan pada komponen belanja barang operasional K/L. Dari data yang diperoleh sebenarnya ada 3 K/L yang mengalokasikan akun 526xxx pada komponen belanja barang operasional pada pagu DIPA awal. Namun terdapat 1 (K/L) yang telah dilakukan revisi sehingga tersisa 2 (dua) K/L yang masih terdapat akun 526xxx pada belanja barang operasional dan seluruhnya adalah K/L diluar mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian.

Akun belanja perjalanan dinas paket meeting baik dalam maupun luar kota digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan

sejenisnya yang dilaksanakan di dalam dan luar kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota dan luar kota satker peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta. Sedangkan alokasi perjalanan dinas yang dapat dialokasikan dalam komponen belanja operasional adalah belanja perjalanan dinas biasa dalam rangka koordinasi dengan satker vertikal baik dalam maupun luar negeri. Sedangkan belanja perjalanan dinas yang sifatnya kegiatan teknis tidak dapat dialokasikan dalam belanja operasional K/L. Secara total alokasi belanja perjalanan dinas paket meeting sebesar Rp153,8 Triliun. Komposisi terbesar dialokasikan oleh K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian sebesar Rp81,4 Triliun pada 18 K/L. Jika dilihat rata-rata per K/L, maka K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman mengalokasikan belanja honor output kegiatan pada belanja barang operasional sebesar Rp4,5 Triliun sedangkan K/L diluar mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman sebesar Rp2,4 Triliun.

Akun belanja terkait covid-19 merupakan akun komponen belanja barang operasional yang dibuat khusus dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Namun demikian, setelah diterbitkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia maka seharusnya akun Covid-19 semestinya digunakan sampai dengan semester I tahun 2023. Namun demikian, berdasarkan data tersebut masih ada alokasi akun covid-19 sebesar Rp168,4 Miliar pada komponen belanja barang operasional. Alokasi tersebut sebagian sudah ada yang dilakukan realisasi anggaran sehingga sulit dilakukan revisi namun ada juga yang belum dilakukan revisi ralat akun. Dari total alokasi tersebut, K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman mengalokasikan sebesar Rp116 Miliar pada 20 K/L.

4.2 Analisis Belanja Operasional K/L Hasil Regresi

Data yang digunakan dalam analisis belanja operasional KL adalah realisasi belanja operasional tiga tahun terakhir yaitu tahun 2021-2023. Hal tersebut mengacu pada penelitian Renosa (2018) yang menyatakan bahwa realisasi belanja operasional baik belanja pegawai maupun belanja barang operasional pada satu dan dua tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap belanja operasional tahun berikutnya. Selain variabel tersebut, pada kajian ini ditambah variabel lain yaitu jumlah satker untuk mengetahui apakah jumlah satker juga berpengaruh terhadap alokasi belanja operasional K/L.

Analisis belanja operasional K/L dilakukan dengan menggunakan analisis regresi, analisis cluster dan metode selang kepercayaan. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap belanja operasional K/L. Dari hasil regresi tersebut dilanjutkan dengan analisis cluster untuk mengelompokkan K/L yang memiliki karakteristik sejenis. Sedangkan K/L yang memiliki karakteristik berbeda berdasarkan variabel yang digunakan maka akan dikelompokkan pada cluster yang berbeda. Pada masing-masing cluster akan dihitung range belanja operasional dengan metode selang kepercayaan. Alokasi belanja operasional K/L tahun 2023 dinilai tidak efisien jika alokasinya berada diluar dari range hasil perhitungan selang kepercayaan.

Dalam penelitian ini, analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi berganda karena terdapat tiga variabel independen. Sebelum dilakukan analisis regresi perlu mengetahui hasil uji asumsi pada data yang digunakan agar persamaan regresi yang diperoleh dapat

memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan regresi. Uji asumsi ini dilakukan hanya untuk model regresi linear OLS (*Ordinary Linear Square*) baik yang sederhana maupun berganda. Sedangkan regresi yang tidak berdasarkan pada OLS tidak memerlukan uji asumsi klasik. Hasil uji asumsi klasik pada model awal tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik Model Awal Analisis Regresi Linear Berganda

No	Uji Asumsi	Metode	Indikator	Kesimpulan
1	Ketidaknormalan	Kolmogorov Smirnov	p-value=0,017	Tidak normal
2	Autokorelasi	Run Test	p-value=0,710	Tidak terdapat autokorelasi
3	Heteroskedastisitas	Uji Glejser	p-value=0,000	Terdapat heteroskedastisitas
4	Multikolinearitas	Variance Inflation Factor	VIF>10	Terdapat multikolinearitas

Sumber data : Bussiness Intelligence DJA 2023, diolah.

Berdasarkan tabel diatas, dari 4 (empat) uji asumsi hanya satu yang terpenuhi yaitu uji autokorelasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi data dan penggunaan analisis regresi komponen utama untuk mengatasi permasalahan uji asumsi tersebut. Hasil transformasi data dan analisis regresi komponen utama menunjukkan bahwa belanja operasional baik satu tahun dan dua tahun sebelumnya serta jumlah satker berpengaruh terhadap belanja operasional K/L. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil secara bersama-sama dengan menggunakan uji F (p-value<0,05) maupun secara parsial dengan menggunakan uji t (p-value <0,05). Nilai koefisien determinasi sebesar 0,719 menunjukkan bahwa sebesar 71,9% keragaman data mampu dijelaskan oleh variabel independent serta sisanya sebesar 28,1% dijelaskan oleh faktor eksternal yang tidak masuk ke dalam persamaan regresi. Secara lengkap hasil analisis regresi komponen utama dengan data yang sudah dilakukan transformasi box cox sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Komponen Utama

No	Hasil Uji	Nilai	Indikator	Kesimpulan
1	Uji F	0,000	<0,05	Signifikan
2	Uji t			
	a. Komponen Utama 1	0,000	<0,05	Signifikan
	b. Komponen Utama 2	0,003	<0,05	Signifikan
3	Koefisien Determinasi (R ²)	71,9	R ² >70	Layak

Sumber data : Bussiness Intelligence DJA 2023, diolah.

Hasil analisis regresi komponen utama perlu dilakukan transformasi untuk mengetahui koefisien masing-masing variabel independen. Hal tersebut dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap alokasi belanja operasional. Persamaan regresi komponen utama yang dihasilkan sebagai berikut:

$$B.\text{Operasional K/L}=27,14 - 0,78\text{KU1} - 1,14 \text{KU2} + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka hasil transformasi persamaan regresi untuk variabel belanja operasional satu tahun dan dua tahun sebelumnya serta jumlah satker pada masing-masing komponen utama diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$B.Operasional\ K/L=27,14 + 0,005B02 + 0,05B01 + 1,38S + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan model regresi di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap belanja operasional K/L serta yang memiliki pengaruh terbesar adalah jumlah satker, kemudian belanja operasional satu tahun sebelumnya dan yang terakhir belanja operasional dua tahun sebelumnya. Dari hasil analisis regresi tersebut, selanjutnya dilakukan analisis cluster menggunakan data tahun 2023 pada K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis cluster yaitu tidak terdapat korelasi antar variabel yang digunakan. Karena variabel belanja operasional baik satu tahun dan dua tahun sebelumnya serta jumlah satker saling berkorelasi, maka yang dijadikan variabel adalah hasil komponen utama pada analisis regresi sebelumnya. Metode yang digunakan dalam analisis cluster adalah uji single linkage dengan jarak Euclid. Pengelompokan tersebut didasarkan pada kemiripan data dalam satu cluster sebesar 99%. Hasil analisis cluster dengan metode tersebut menghasilkan 16 cluster dari total 26 K/L lingkup mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

Selanjutnya, hasil pengelompokan tersebut dilakukan penilaian alokasi belanja operasional K/L dengan menggunakan metode selang kepercayaan. Bagi cluster yang hanya memiliki satu anggota maka tidak dapat dilakukan perhitungan dengan metode selang kepercayaan. Sedangkan yang memiliki anggota lebih dari satu K/L dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode selang kepercayaan. Berikut hasil perhitungan belanja untuk K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Belanja Operasional K/L

Cluster	K/L	Alokasi B. Operasional (Miliar Rp)	Cluster	K/L	Alokasi B. Operasional (Miliar Rp)
1	Kemenkeu	26.942,74	9	Kemen PUPR	5.480,04
2	Kementan	3.232,19	10	Kemenko Ekon, Kemen BUMN, BSN. KPPU, BPKPB Sabang, Kemenko Marves, Bapanas, OIKN	69,33 s.d 144,04
3	Kemenperin	1.109,89	11	Kemenparekraf, Basarnas	667,81 s.d 739,21
4	KESDM	1.463,08	12	Kemen KUKM, BKPM, BP2MI	174,14 s.d 265,32
5	Kemenhub	7.254,14	13	Kemen ATR/BPN	3.666,21
6	Kemenaker	829,09	14	BPKP	1.135,65
7	KLHK	2.690,00	15	Kemendag	1.032,39
8	KKP	2.836,78	16	BPKPB Batam	701,13

Sumber data : Bussiness Intelligence DJA 2023, diolah.

Dari hasil perhitungan tersebut terdapat 2 K/L pada cluster 10 yang nilainya dibawah range alokasi belanja operasional serta 1 K/L yang nilainya diatas range alokasi belanja operasional. Selain itu juga ada 1 K/L pada cluster 12 yang nilainya diatas range alokasi belanja operasional.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara umum selama 3 (tiga) tahun terakhir, alokasi belanja operasional K/L mengalami kenaikan yang signifikan baik K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman maupun K/L diluar mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat deviasi yang besar antara pagu DIPA awal dengan pagu DIPA revisi pada alokasi belanja operasional K/L. Hal tersebut menunjukkan bahwa K/L belum dapat merencanakan alokasi belanja operasional dengan baik. Kaidah RSPP merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Dalam penelitian ini, kaidah RSPP digunakan untuk melakukan reviu atas penggunaan akun dalam pengalokasian belanja operasional K/L. Dengan penggunaan akun yang tepat sesuai kaidah RSPP dapat mengurangi deviasi antara pagu DIPA awal dengan pagu DIPA revisi belanja operasional K/L. Hasil reviu terhadap belanja operasional K/L dengan menggunakan kaidah RSPP menunjukkan bahwa terdapat beberapa akun belanja yang tidak sesuai dengan kaidah perencanaan dan penganggaran sebesar Rp576,4 Miliar. Akun-akun tersebut diantaranya akun belanja transito pada belanja pegawai K/L, akun belanja honor ouput kegiatan, belanja bantuan Pemerintah yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, belanja perjalanan dinas paket meeting, dan belanja penanganan pandemi covid-19 pada belanja barang operasional K/L.

Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan analisis belanja operasional K/L dengan metode selang kepercayaan berdasarkan data series 3 (tiga) tahun terakhir. Namun demikian karena masing-masing K/L memiliki karakteristik yang berbeda-beda maka perlu dilakukan pengelompokan terhadap K/L tersebut dengan metode analisis cluster. Untuk melakukan analisis cluster perlu mengetahui variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja operasional K/L dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil analisis regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel belanja operasional baik satu tahun dan dua tahun sebelumnya serta jumlah satker memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap alokasi belanja operasional K/L. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis cluster yang menghasilkan 16 cluster dari total 26 K/L lingkup mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Masing-masing cluster dihitung range alokasi belanja operasional dengan menggunakan metode selang kepercayaan. Dari hasil perhitungan tersebut terdapat 4 K/L yang nilainya berada diatas atau dibawah range alokasi belanja operasional K/L.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran K/L khususnya terkait pengalokasian belanja operasional K/L dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama dapat dilakukan dengan penggunaan akun belanja operasional K/L sesuai kaidah RSPP. Untuk meminimalisir kesalahan penggunaan akun tersebut perlu ditambahkan validasi dalam Sakti. Penggunaan akun yang tidak sesuai secara otomatis tidak dapat diproses dalam penyusunan RKA-K/L. Cara yang kedua untuk mengurangi deviasi alokasi belanja operasional K/L antara pagu DIPA awal dengan pagu DIPA revisi dapat dilakukan dengan menentukan alokasi belanja operasional K/L berdasarkan data series tahun sebelumnya. Selain perhitungan menggunakan metode selang kepercayaan, dapat juga dilakukan proyeksi menggunakan

persamaan regresi berdasarkan data series yang lebih banyak serta penambahan variabel lain selain variabel belanja operasional baik satu tahun dan dua tahun sebelumnya serta jumlah satker.

DAFTAR PUSTAKA

- Erman, Sulaiman. (2021). *Perekonomian Indonesia (Suatu Tinjauan Konseptual*. Kota Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang *Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*.
- Gathama, Norista dan Mudakir. (2011). *Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Operasi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah*. Universitas Dipenogoro.
- Hanada, Siti. (2021). *Penggunaan Analisis Cluster dalam Pengelompokan Kecamatan di Kabupaten Karawang Berdasarkan Metode Kontrasepsi Peserta KB Aktif*. Prosiding Statistika, Unisba.
- Setiawan, Paulus Evander Prihatino. (2020). *Analisis Pengaruh Perubahan Harga Komoditas Kopi dan Perubahan Valuta Asing Terhadap Return Saham Perusahaan Kopi yang Go Public Pada Tahun 2014-2019*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Suhaimi, et. all. (2022). *Panduan Perencanaan dan Penganggaran Program Pendidikan Islam 2023 Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*. Jakarta: Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag.
- Zamaro, Renosa Tosca. (2018). *Analisis Penghitungan Proyeksi Belanja Operasional Kementerian Negara Dan Lembaga Untuk Penyusunan Pagu Indikatif*. Jurnal Akurasi.